

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kredit yang dilakukan terhadap laporan keuangan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) periode 2018-2020 dengan menggunakan pendekatan rasio keuangan yang mencakup aspek likuiditas dan solvabilitas, diperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi serta kinerja keuangan perusahaan selama periode penelitian tersebut.

Pemilihan periode analisis 2018-2020 dianggap tepat karena mencerminkan dua kondisi ekonomi yang berbeda, yaitu masa operasional normal pada tahun 2018-2019 dan masa terdampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Dengan demikian, hasil analisis mampu menunjukkan tingkat ketahanan (resiliensi) keuangan perusahaan dalam menghadapi tekanan eksternal yang signifikan. Meskipun PT Pelabuhan Indonesia II belum secara formal menerapkan analisis kredit berbasis rasio keuangan secara sistematis, penerapan metode ini dinilai sangat relevan mengingat posisi strategis perusahaan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor jasa pelabuhan dan logistik, yang menuntut transparansi dan pengelolaan keuangan yang profesional.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, terdapat tiga kesimpulan utama yang dapat ditarik sebagai berikut:

##### 1. Likuiditas Sangat Baik dengan Potensi Peningkatan Efisiensi Aset

PT Pelabuhan Indonesia II menunjukkan kemampuan yang sangat baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hal ini tercermin dari rasio lancar yang berada pada kisaran 3,80-4,46 dan rasio cepat yang berkisar antara 3,70-4,45 selama tahun 2018-2020. Nilai tersebut jauh

di atas standar industri sebesar 2,0, menandakan posisi kas dan aset lancar yang sangat kuat. Namun demikian, tingginya rasio likuiditas tersebut juga dapat mengindikasikan adanya kelebihan dana (idle cash) yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan investasi produktif atau ekspansi usaha. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan aset lancar agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan pendapatan.

## 2. Struktur Permodalan Perlu Diperkuat

Analisis solvabilitas memperlihatkan bahwa perusahaan memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap sumber pendanaan berbasis utang. Debt to Asset Ratio (DAR) tercatat berada di kisaran 0,65-0,68, sedangkan Debt to Equity Ratio (DER) berada pada rentang 1,87-2,12. Nilai DER yang melebihi 2,0 menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam struktur modal yang dapat meningkatkan risiko keuangan perusahaan. Jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis seperti PT Hutchison Ports Indonesia, yang memiliki DER pada kisaran 1,2-1,5, PT Pelabuhan Indonesia II perlu mempertimbangkan upaya restrukturisasi utang dan memperbesar proporsi pendanaan yang bersumber dari ekuitas, baik melalui penyisihan laba ditahan maupun penyertaan modal tambahan.

## 3. Keterpaduan antara Kapasitas Teoritis dan Implementasi Pembayaran

Walaupun hasil analisis keuangan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan teoritis yang kuat dalam memenuhi kewajiban finansial, pengalaman yang terjadi pada sejumlah BUMN lain mengindikasikan bahwa kemampuan finansial semata tidak cukup tanpa didukung oleh sistem manajemen kas dan prosedur pembayaran yang efektif. Oleh karena itu, PT Pelabuhan Indonesia II perlu memastikan bahwa kapasitas likuiditas yang tinggi benar-benar tercermin dalam

praktik pembayaran yang tepat waktu dan konsisten, guna menjaga reputasi, kredibilitas, serta kepercayaan para pemangku kepentingan.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat tiga rekomendasi strategis yang dapat dijadikan acuan dalam upaya peningkatan kinerja keuangan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) di masa mendatang, yaitu sebagai berikut:

### 1. Optimalisasi Struktur Permodalan dan Pengendalian Pembiayaan Utang

PT Pelabuhan Indonesia **n** perlu melakukan penataan kembali struktur permodalannya dengan cara meningkatkan proporsi pendanaan yang bersumber dari ekuitas serta mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan berbasis utang. Upaya ini dapat ditempuh melalui reinvestasi laba ditahan, penambahan modal dari pemegang saham, restrukturisasi komposisi utang, serta negosiasi ulang perjanjian pinjaman guna memperoleh tingkat suku bunga yang lebih kompetitif. Selain itu, perusahaan perlu memprioritaskan pelunasan kewajiban dengan beban bunga tinggi agar dapat menekan biaya modal (cost of capital) secara keseluruhan dan meningkatkan efisiensi keuangan perusahaan.

### 2. Peningkatan Pengelolaan Likuiditas dan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Lancar

Perusahaan disarankan untuk memaksimalkan pengelolaan aset lancar dengan menempatkan kelebihan dana pada instrumen investasi jangka pendek yang likuid dan memberikan imbal hasil optimal, atau mengalokasikannya untuk pengembangan bisnis serta modernisasi infrastruktur digital dan teknologi smart port. Di samping itu, efisiensi dalam siklus konversi kas perlu ditingkatkan melalui percepatan proses penagihan piutang dan penerapan sistem pembayaran berbasis digital. PT Pelabuhan Indonesia **n** juga perlu memastikan bahwa

pembayaran kepada pemasok dan kreditur dilaksanakan tepat waktu guna menjaga reputasi perusahaan dan menghindari terulangnya permasalahan serupa yang pernah dialami oleh beberapa BUMN lain terkait keterlambatan pembayaran.

### 3. Penerapan Analisis Kredit secara Terintegrasi dan Penguatan Sistem Monitoring Keuangan

PT Pelabuhan Indonesia II diharapkan mengintegrasikan analisis kredit berbasis rasio keuangan sebagai bagian dari sistem pemantauan (monitoring) keuangan internal yang dilakukan secara berkala, minimal setiap triwulan. Untuk mendukung implementasi tersebut, perusahaan dapat membentuk tim analisis keuangan khusus yang bertugas melakukan evaluasi rutin, menetapkan Key Performance Indicators (**KPI**) yang terukur berdasarkan hasil rasio keuangan, serta melakukan benchmarking terhadap perusahaan pelabuhan lain di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, penerapan prinsip transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) harus terus diperkuat guna meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.